

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sektor perbankan sangat penting bagi pembangunan ekonomi di suatu negara. Ketika sektor perbankan terpuruk maka akan berdampak pada perekonomian nasional. Sebaliknya ketika perekonomian mengalami stagnasi sektor perbankan juga terkena imbasnya dimana fungsi intermediasi tidak berjalan normal (Kiryanto,2007).

Perbankan menjadi salah satu sektor yang mempunyai peran besar dalam perekonomian suatu negara karena fungsi dari bank adalah sebagai perantara keuangan antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kelebihan dana dapat disalurkan kepada pihak - pihak yang memerlukan dana dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bank menerima simpanan uang dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) dan kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit (Kasmir, 2008)

Menurut Halim Alamsyah, dkk (2005) peran perbankan yakni sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan dan juga mempengaruhi siklus usaha dalam perekonomian. Peran bank sebagai sumber pembiayaan dikarenakan bank lebih penting dibandingkan dengan lembaga keuangan bukan bank dalam menghadapi informasi yang asimetris dan mahalnya biaya dalam melakukan fungsi intermediasi. Perbankan dalam membiayai kegiatan untuk melakukan fungsi intermediasi bank memiliki sumber dana yang dapat digunakan sesuai kebutuhan bank itu sendiri. Sumber pembiayaan dunia usaha di Indonesia

didominasi oleh penyaluran kredit perbankan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, karena dengan adanya penyaluran kredit memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi sehingga dengan adanya investasi perekonomian suatu negara akan ikut bergerak.

Berdasarkan UU NO 10 Tahun 1998, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatannya. Kegiatan usaha antara satu bank dengan bank yang lainnya memiliki perbedaan, seperti antara kegiatan bank umum dengan bank perkreditan rakyat. Kegiatan yang dilakukan oleh bank umum lebih luas dibandingkan bank perkreditan. Artinya produk yang ditawarkan oleh bank umum lebih lengkap. Hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis produk dan jasanya. Sedangkan bank perkreditan rakyat mempunyai keterbatasan tertentu sehingga kegiatan menjual produk dan wilayah operasinya lebih sempit dibandingkan dengan bank umum. Kegiatan bank umum tersebut meliputi menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dimana kegiatan ini dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan yakni simpanan Giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*) dan Simpanan Deposito (*time deposit*).

Kegiatan bank umum selanjutnya yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat (*lending*). Kegiatan ini dilakukan melalui pemberian kredit kepada masyarakat. Kredit yang diberikan oleh bank tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkannya. Kegiatan bank umum yang terakhir yakni memberikan jasa-jasa bank lainnya seperti transfer, *kliring*, inkaso, *bank card* dan lain-lain yang dapat memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah. Bank umum dan BPR

dalam membiayai kegiatannya sebagai fungsi intermediasi memiliki sumber dana yang dapat digunakan sesuai kebutuhan bank itu sendiri. Sumber-sumber dana tersebut dapat bersumber dari Bank itu sendiri atau dana yang bersumber dari masyarakat luas (Dana Pihak Ketiga) dan dana yang bersumber dari lembaga lainnya (Rahardja, 1997).

Dana yang bersumber dari DPK merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini (Kasmir, 2008). DPK selanjutnya digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit.

Berdasarkan laporan Statistik Perbankan Indonesia pada tahun 2010-2014 dapat diketahui posisi DPK Bank Umum, Bank Syariah dan BPR. Proporsi DPK Bank Umum terhadap perbankan nasional pada tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 (posisi Desember) berturut-turut sebesar 95,61%, 94,77%, 94,37%, 94% dan 93,70% sedangkan posisi DPK Bank Syariah berturut-turut sebesar 3.10%, 3.92%, 4.31%, 4.70%, 4.96% dan 4.90%. Posisi DPK Bank Umum lebih besar dibandingkan posisi DPK Bank Syariah, begitu juga posisi DPK Bank Perkreditan Rakyat (*Rural Bank*) masih berada dibawah angka 2%. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Umum Dalam menghimpun dana dari masyarakat sangat efektif dibandingkan Bank Syariah dan BPR sehingga Bank Umum memiliki dana yang besar untuk melakukan pembiayaan kegiatannya terutama dalam memberikan kredit kepada masyarakat. Kredit yang diberikan kepada masyarakat akan memberikan manfaat atau keuntungan bagi bank.

Kredit mendominasi besarnya aktiva bank dimana kegiatan perkreditan mencapai 70% - 80% dari total aktiva bank. Pendapatan yang diterima oleh bank

bersumber dari bunga dan proporsi kredit. Hal ini dikarenakan aktivitas bank yang terbanyak akan berkaitan erat secara langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan perkreditan (Nurmawan, 2005).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penyaluran kredit mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Goldsmith (1969), Mc Kinon (1973), dan Shaw (1973) menyatakan bahwa dana berlebih (*surplus fund*) yang disalurkan secara efisien bagi unit yang mengalami defisit akan meningkatkan kegiatan produksi. Selanjutnya kegiatan tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada level mikro Gertler dan Gilchrist (1994) membuktikan bahwa adanya kendala dalam penyaluran kredit dapat berdampak pada kehancuran usaha - usaha kecil.

Meskipun penyaluran kredit memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi negara, namun kredit yang disalurkan oleh Perbankan Syariah diduga belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR). LDR merupakan indikator dalam pengukuran fungsi intermediasi perbankan di Indonesia. Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, rasio LDR dihitung dari pembagian kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk antar bank) dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencakup giro, tabungan dan deposito (tidak termasuk antar bank). Semakin tinggi LDR menunjukkan semakin besar pula DPK yang dipergunakan untuk penyaluran kredit yang berarti bank telah mampu menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik. Disisi lain LDR yang terlampau tinggi dapat menimbulkan risiko likuiditas bagi bank. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, angka LDR seharusnya berada disekitar 85% - 110%. Tujuan penting dari

perhitungan LDR adalah untuk mengetahui serta menilai sampai berapa jauh bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan operasi atau kegiatan usahanya. Dengan kata lain LDR digunakan sebagai suatu indikator untuk mengetahui tingkat kerawanan suatu bank.

Berdasarkan statistik perbankan Indonesia LDR pada Perbankan syariah berfluktuatifdimana rasio LDR pada tahun 2010-2011 sebesar 87,60% dan 91,41% hal ini menunjukkan rasio LDR sudah sesuai harapan Bank Indonesia, pada tahun 2013 dan 2012 posisi LDR besar dari angka 110% yakni sebesar 120,65% dan 121.46%, hal ini menunjukkan bahwa LDR perbankan syariah terlalu tinggi sehingga dapat menimbulkan risiko likuiditas bank, pada tahun 2014 rasio LDR kembali turun menjadi 86.66%. Dari penjelasan diatas rasio LDR pada perbankan syariah diduga tidak sehat sehingga akan berdampak terhadap penyaluran kredit pada Perbankan Syariah.

Penyaluran kredit pada Perbankan Syariah disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan merupakan suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana. Pembiayaan merupakan fungsi penggunaan dana terpenting bagi bank komersial, dalam hal ini adalah khususnya bagi bank syariah (Arifin, 2006). Pada periode penelitian kinerja pembiayaan Bank Syariah meningkat tetapi besaran pembiayaan masih sangat kecil jika dibandingkan dengan kredit yang diberikan bank umum konvensional. Besaran pembiayaan hanya sekitar 3-5% dari besaran kredit. Hal ini menunjukkan bahwa pangsa pembiayaan perbankan syariah masih sangat kecil jika dibandingkan dengan pangsa kredit bank umum konvensional.

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia pada tahun 2010-2015 (Desember) besaran pembiayaan pada Bank Syariah berturut-turut sebesar 68.187, 102.655, 147.505, 180.833, 199.330, 213.989 miliar rupiah. Sedangkan pada Bank Umum besaran kredit yang disalurkan berturut-turut sebesar 1.765.845, 2.200.094, 2.725.674, 3.319.842, 3.706.501, 1.791.495 miliar rupiah. Hal ini terlihat sangat jauh berbeda. Meskipun dari tahun ke tahun pembiayaan pada Bank Syariah selalu mengalami peningkatan. Tetapi angka nominal pembiayaan jauh lebih kecil di bandingkan dari angka nominal kredit pada Bank Umum. Kecilnya pembiayaan yang disalurkan oleh Perbankan Syariah dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang berasal dari kegiatan internal bank dan juga berasal dari eksternal bank.

Menurut Wibowo (2007), Informasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dalam penyaluran pembiayaan atau kredit adalah berupa informasi akuntansi dan non akuntansi. Informasi akuntansi dapat diperoleh melalui laporan keuangan bank berupa rasio keuangan, dimana rasio keuangan tersebut seperti rasio profitabilitasnya, rasio pembiayaan bermasalah dan rasio-rasio lainnya. Menurut Perry Warjiyo (2004) mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran uang secara implisit beranggapan bahwa semua dana yang dimobilisasi perbankan dari masyarakat dalam bentuk uang beredar dipergunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit perbankan.

Kenyataannya anggapan seperti itu tidak selamanya benar. Selain dana yang tersedia perilaku penawaran kredit perbankan juga dipengaruhi oleh persepsi bank terhadap prospek usaha debitur dan kondisi perbankan itu sendiri seperti

permodalan (CAR), jumlah kredit macet (NPL), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Menurut Djoko Retnadi (2006) kemampuan menyalurkan kredit oleh perbankan dipengaruhi oleh berbagai hal yang dapat ditinjau dari sisi internal dan eksternal bank. Dari sisi internal bank dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat dan penetapan tingkat suku bunga. Dan dari sisi eksternal bank dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, peraturan pemerintah dan lain - lain. Sementara menurut Sinungan (2000) kebijakan perkreditan harus memperhatikan beberapa faktor seperti: keadaan keuangan bank saat ini, pengalaman bank dan keadaan perekonomian. Indikator berikut akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit atau pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia, dimana faktor tersebut terdiri dari Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Asset* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF) dan Tingkat Inflasi.

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu: dalam bentuk giro, deposito dan tabungan.

*Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu rasio probabilitas yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan

keuntungan dengan memanfaatkan total modal yang dimiliki. Semakin besar nilai ROA, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan asset (Triasdini, 2010). Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, maka standar ROA yang baik adalah sebesar 1,5%.

*Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Sehingga rasio NPF harus di minimalisasikan agar kredit atau pembiayaan berjalan dengan baik. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain (Almilia, 2005).

Inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Peningkatan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya (Bank Indonesia, 2016). Kenaikan inflasi diikuti dengan peningkatan BI *Rate* sebagai suku bunga acuan sehingga bank-bank umum merespon dengan menaikkan suku bunga simpanan yang kemudian diikuti dengan kenaikan suku bunga pinjaman yang pada akhirnya akan mempengaruhi penyaluran kredit kepada masyarakat atau nasabah.

Berdasarkan penjelasan diatas peranan perbankan di Indonesia sangatlah penting dalam pembangunan ekonomi. Kegiatan yang dilakukan oleh bank seperti halnya penyaluran kredit dapat membantu dalam mempengaruhi siklus usaha

dalam perekonomian secara keseluruhan. Kegiatan penyaluran kredit tersebut pada setiap bank memiliki besaran angka nominal yang berbeda-beda. Seperti halnya pada perbankan syariah, meskipun pembiayaan yang disalurkan dari tahun ke tahun meningkat namun angka nominal yang disalurkan sangatlah kecil jika dibandingkan dengan bank umum. Hal ini diduga disebabkan karena keadaan rasio keuangan yang memburuk dan juga karena keadaan faktor eksternal yang tidak mendukung. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui faktor mana yang lebih berpengaruh terhadap penyaluran kredit pada perbankan syariah di Indonesia periode 2007-2015. Dari paparan diatas maka judul dari penelitian ini yaitu:

**“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2007-2015”**

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka pokok permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan penyaluran kredit pada perbankan syariah di Indonesia periode 2007-2015?
2. Bagaimana pengaruh, Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Asset* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF) dan tingkat inflasi terhadap penyaluran kredit pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2007-2015?

**1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis perkembangan penyaluran kredit pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2007-2015.

2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Asset* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF) dan tingkat inflasi terhadap penyaluran kredit pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2007-2015?

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Dapat menjadi masukan bagi praktisi perbankan syariah dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan penyaluran kredit agar bisa meminimalisir potensi kredit bermasalah.
2. Sebagai bahan kajian atau masukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan topik penelitian.
3. Dapat memperkaya pemahaman bagi penulis mengenai konsep-konsep yang telah dipelajari dengan membandingkannya dalam praktik perbankan khususnya berkenaan dengan tema perbankan syariah dan penyaluran kredit pada perbankan syariah.

#### 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan menganalisis tentang faktor yang memengaruhi jumlah pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah yang diteliti adalah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Faktor-faktor yang akan diteliti berasal dari sisi internal dan eksternal perbankan syariah. Variabel yang digunakan diperoleh dari rasio keuangan perbankan syariah khususnya pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan data inflasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa data bulanan

periode 2007-2015. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode OLS.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Adapun masing-masing bab secara singkat dijelaskan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menguraikan tentang kerangka teori dan tinjauan pustaka yang terdiri dari pandangan-pandangan secara teoritis yang berkaitan dengan masalah penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode pengkajian masalah, data penelitian yang berisi antara lain variabel penelitian, karakteristik data, penjelasan tentang prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis data.

### **BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian, meliputi gambaran umum tentang perbankan syariah di Indonesia, Kredit, DPK, ROA, NPF Perbankan Syariah dan tingkat inflasi di Indonesia

## **BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan penemuan. Menjelaskan penjabaran data, hasil pengolahan data dan kemudian interpretasi dari hasil pengolahan data tersebut.

## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan dan memberikan saran-saranyang mendukung.

